

COOPERATIVE POSITIVE LEARNING

dalam PENDIDIKAN INKLUSI



HARWANTI NOVIANDARI, dilahirkan pada tanggal 05 November 1983, Banyuwangi, Jawa Timur, putri dari pasangan bapak Suharno dan Ibu Sri Purwaningsih, anak pertama dari dua bersaudara. Ibu dari dua putra Fahad Indra Tanaya (13 tahun) dan Fariq Aditya Permana (6tahun). Pendidikan formal diselesaikan di SD Negeri Kebalenan Banyuwangi (1995), SMP Negeri 2 Banyuwangi (1998), SMA Katolik Hikmah Mandala Banyuwangi (2001), Diploma 1 Program Studi Informatika Terapan Universitas Airlangga (2002), S1 Program Studi Psikologi Universitas PGRI Banyuwangi (2006), S2 Program Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2014). Sejak tahun 2015 menjadi tenaga pengajar di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi, mengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, Assesment Psikologi Teknik Non Tes, Assesment Psikologi Teknik Non Tes, Konseling Multi Budaya, Konseling Kognitif, Praktikum Konseling Kognitif, Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Non Formal.



FITRIATUL MASRUROH, dilahirkan pada tanggal 06 maret 1995 di sebuah desa kecil kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fitri merupakan alumni S1 universitas Darul Ulum Jombang Fakultas Psikologi. Meskipun pada awal kuliah mendapatkan pertentangan dari sang aba, namun karena mampu membuktikan, akhirnya ia mendapat dukungan kuat dari keluarga untuk melanjutkan ke jenjang magister profesi Psikologi di Universitas 17 agustus Surabaya (UNTAG). Saat ini Fitri aktif sebagai konsultan dilayanan Lembaga Psikologi EKSHAFIT, berprofesi dosen di suatu lembaga Pendidikan Di Kab. Banyuwangi, serta aktif menjadi judges untuk Cooperative Positive Learning, dan juga volunteer Pusat Studi Gender dan Anak, fitri juga aktif menulis di beberpa media.



COOPERATIVE POSITIVE LEARNING dalam PENDIDIKAN INKLUSI

Harwanti Noviandari, M. Psi.
Fitriatul Masruroh, M.Psi. Psy.

COOPERATIVE POSITIVE LEARNING

dalam PENDIDIKAN INKLUSI



PENERBIT LAKEISHA

Jl. Jatiem Bayuh
Sektor, P.O. Box, P.O. 001,
Purwokerto, Tegal
Klaten, Jateng, Indonesia 51462
Email: penerbit.lakeisha@yandex.com
HP/WA: 0969880862
Website: <http://www.penerbitlakeisha.com>



Penerbit
LAKEISHA

COOPERATIVE POSITIVE LEARNING
dalam
PENDIDIKAN INKLUSI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Harwanti Noviandari, M. Psi.
Fitriatul Masruroh, M.Psi. Psy.**

COOPERATIVE POSITIVE LEARNING
dalam
PENDIDIKAN INKLUSI



**Penerbit Lakeisha
2021**

COOPERATIVE POSITIVE LEARNING dalam PENDIDIKAN INKLUSI

Penulis:

Harwanti Noviandari, M. Psi.

Fitriatul Masruroh, M.Psi. Psy.

Editor : Andriyanto, S.S., M.Pd.

Layout: Yusuf Deni Kristanto, S.Pd.

Desain Cover: Tim Lakeisha

Cetak I November 2021

15.5 cm × 23 cm, 68 Halaman

ISBN: 978-623-5536-76-7

Diterbitkan oleh Penerbit Lakeisha
(**Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019**)

Redaksi

Srikaton, Rt. 003, Rw. 001, Pucangmiliran,

Tulung, Klaten, Jawa Tengah

Hp. 08989880852, Email: penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website: www.penerbitlakeisha.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya hingga tim penulis dapat menyelesaikan naskah buku dengan judul *Cooperative Positive Learning* dalam Pendidikan Inklusi. Urgensi pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi sekarang menjadi perhatian berbagai pihak untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi. Buku ini berisi mengenai pemahaman konsep dasar mengenai pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi, elemen-elemen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, implementasi *Cooperative Positive Learning* dalam pendidikan inklusi, terutama penanganan pada mahasiswa berkebutuhan khusus dengan karakteristik lamban belajar (*slow learner*).

Lembaga pendidikan bersama pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang mengakomodasi mahasiswa berkebutuhan khusus melalui berbagai alternatif jalur pendidikan, baik melalui implementasi pendidikan inklusi maupun

jalur pendidikan lainnya. Kesadaran tentang pentingnya elemen-elemen pendidikan tersebut menjadi salah satu upaya disusunnya buku ini, dengan harapan dapat menggugah pembaca untuk lebih peduli dan terlibat dalam menciptakan lingkungan inklusi yang kaya stimulasi untuk optimalisasi potensi anak-anak berkebutuhan khusus, baik di tingkat Pendidikan Prasekolah hingga ke Perguruan Tinggi.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua.

Banyuwangi, 01 November 2021

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
BAGIAN II PENDIDIKAN INKLUSI	8
A. Konsep Layanan Pendidikan Inklusi	8
B. Landasan Hukum.....	13
C. Dinamika Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi.....	14
D. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.....	20
1. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	20
2. Identifikasi Bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus	24
3. Kurikulum dalam Pendidikan Inklusi	25
4. Tenaga Pengajar atau Dosen.....	30
5. Kegiatan Pembelajaran.....	32
6. Evaluasi dan Penilaian	35
7. Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusi.....	37

BAGIAN III COOPERATIVE POSITIVE LEARNING	
(CPL)	39
A. Konsep Dasar <i>Cooperative Positive Learning</i> (CPL)	41
B. Rancangan Model <i>Cooperative Positive Learning</i> (CPL) ..	47
C. Langkah-Langkah Penugasan dalam Implementasi	
Model <i>Cooperative Positive Learning</i> (CPL).....	51
1. Penugasan 1 (<i>Who Am I?</i>)	51
2. Penugasan 2 (<i>I Can See it</i>).....	52
3. Penugasan 3 (<i>My Wonderfull Culture</i>)	52
4. Penugasan 4 (<i>I Am Promise</i>)	53
BAGIAN IV PENUTUP	55
DAFTAR PUSTAKA	57
TENTANG PENULIS	66



BAGIAN I

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus di Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang berkebutuhan khusus (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan/hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau model-model pembelajaran yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga kelak mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesempatan bagi para penyandang kebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi semakin terbuka luas dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 10 ayat a, yakni: Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Pada pasal 18: Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas aksesibilitas, kemudian pada pasal 40 Ayat 1: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Peraturan ini dibuat untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus yang hendak meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Konsep Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi, sehingga dalam pembahasan selanjutnya kita sebut dengan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi. Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi merupakan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) bersama dengan mahasiswa reguler. Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mahasiswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi, telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Banyuwangi sejak bulan Agustus tahun 2014 dengan mendeklarasikan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Inklusi dengan tujuan membangun sistem pendidikan inklusi yang mengusung prinsip pendidikan untuk semua siswa tanpa diskriminasi, baik normal maupun berkebutuhan khusus, dan penyandang disabilitas dapat belajar di sekolah yang sama, mata pelajaran yang sama dan dapat mengikuti kegiatan di sekolah tanpa ada diskriminasi. Namun, implementasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi belum sepenuhnya diterapkan di beberapa Perguruan Tinggi yang terdapat di Banyuwangi, baik negeri maupun swasta. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang dilasanakan dalam konsep pendidikan inklusi di Kabupaten Banyuwangi baru diselenggarakan di Lembaga Pendidikan Tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang telah dilengkapi dengan guru pembimbing khusus dan sarana prasarana yang aksesibel bagi mahasiswa penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.

Kesiapan Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menerima dan mengelola pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus juga telah dituangkan dalam Permenristek Dikti yang telah diatur hak dan kewajiban mahasiswa berkebutuhan khusus, hak dan kewajiban perguruan tinggi serta tata kelola layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi. Namun, implementasi yang sesungguhnya ditemukan beberapa kendala dan keterbatasan dalam memberikan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di Perguruan Tinggi, penyebab lainnya adalah karena tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus.

Sedangkan hal tersebut merupakan salah unsur yang dibutuhkan mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan yang setara dengan mahasiswa regular.

Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua individu untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak Perguruan Tinggi melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu mahasiswa. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan/atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

Menurut Permendiknas RI No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi. Sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan mahasiswa berkebutuhan khusus belajar di perguruan tinggi terdekat untuk mengikuti perkuliahan di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Perguruan Tinggi Inklusi adalah perguruan tinggi yang

menampung semua mahasiswa di kelas yang sama. Perguruan tinggi atau program studi yang menerapkan pendidikan inklusi ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap mahasiswanya maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para dosen dan mahasiswa lainnya.

Implementasi pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan berbagai kegiatan dan pengalaman perkuliahan bagi semua mahasiswa yang membutuhkan pendidikan tidak terkecuali mahasiswa berkebutuhan khusus. Dengan demikian, adanya pendidikan inklusi berpotensi mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi setiap anak dengan segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus yang hendak melanjutkan studi sampai jenjang perguruan tinggi. Marriam D. Skrdjen (2008) menyatakan, tujuan dari pendidikan inklusi adalah mengurangi kekhawatiran dan membangun, menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan serta membangun sikap memahami dan menghargai pada semua anak yang ingin mengenyam pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Sasaran pendidikan inklusi tidak hanya anak-anak dengan kondisi khusus atau berkelainan saja namun juga termasuk sejumlah besar anak yang terdaftar di berbagai sekolah untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Tujuan pendidikan inklusi ini berarti pertama, menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan, menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas yang menghargai perbedaan yang

menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama, dan sebagainya. Dan mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, intelektual, bahasa dan kondisi lainnya. Kedua, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama dan terbaik bagi semua anak dan orang dewasa yang memerlukan pendidikan, memiliki kecerdasan tinggi, yang secara fisik dan psikologis memperoleh hambatan dan kesulitan baik yang permanen maupun sementara, dan mereka yang terpisahkan dan termarginalkan.

Susie Miles and Nidhi Singal (2010) dalam bukunya yang berjudul *“The Education For All And Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction Or Opportunity”*. Tujuan pendidikan inklusi adalah sebagai langkah kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan pendidikan. Kolaborasi dan sinergi antara inisiatif paralel saat ini, akan didapatkan cara-cara yang praktis para pembuat kebijakan dan dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan secara berkelanjutan sesuai konteks, kebijakan dan praktik. Kesepakatan dalam *Meeting Some Challenges of Inclusive Education in an Age of Exclusionoleh: Roger Slee-The Victoria Institute for Education, Diversity dan Lifelong Learning, Victoria University, Melbourne, Australia*. Tujuan pendidikan inklusi adalah meniadakan pengecualian yang sudah mendarah daging ke dalam struktur sosial global pada umumnya dan pendidikan pada khususnya. Retorika inklusif kuat tetapi konsep dan praktik pendidikan inklusi dilaksanakan secara tidak konsisten dan terputus dari aspek lain dari kebijakan sosial dan pendidikan.

Kepedulian berbagai unsur masyarakat, pemerintah pusat dan daerah pada implementasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi dapat mempercepat upaya

peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di Perguruan Tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan Pendidikan di Perguruan Tinggi yang inklusi. Pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi dapat diawali dengan memfasilitasi mahasiswa dengan model-model pembelajaran inovatif maupun teknologi bantu (teknologi asistif) yang dapat diterapkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi.



BAGIAN II

PENDIDIKAN INKLUSI

A. Konsep Layanan Pendidikan Inklusi

Definisi pendidikan inklusif seperti yang diadopsi oleh 92 pemerintah dan 25 organisasi internasional pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus: Akses dan Kualitas, yang diselenggarakan di Salamanca, Spanyol, pada tahun 1994: Pendidikan inklusif didasarkan pada hak semua peserta didik untuk pendidikan berkualitas yang memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran dan memperkaya kehidupan. Fokus terutama pada kelompok rentan dan terpinggirkan, berusaha untuk mengem bangkan potensi penuh dari setiap individu. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, seperti anak yang memiliki

tidak kecerdasan yang tinggi dan atau bakat istimewa, anak-anak yang dianggap terbelakang yang justru termarginalkan di lingkungan sekitarnya.

Pendidikan Inklusi Perguruan Tinggi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua mahasiswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan mahasiswa pada umumnya (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2021). Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan adalah hak semua anak. Ilmu pendidikan inklusi atau sebidangnya menjadi pengaruh penting dalam pergerakannya pada perguruan tinggi yang menjadi salah satu penentu kualitas pendidikan inklusi pada dunia pendidikan. Perguruan tinggi berperan untuk penentu kesiapan mahasiswa menjadi calon masyarakat yang mempunyai kelebihan pada bidang ilmu pengetahuan (Istiqomah, 2020).

Prinsip dasar pendidikan inklusi adalah bahwa semua anak harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhannya tanpa ada diskriminasi apapun yang mendasari. Menurut Smith (2009), tujuan pendidikan bagi anak yang memiliki hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah. Dengan demikian, pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah dan unit-unit terkecil di dalamnya harus mengakomodasi dan bersikap tanggap terhadap siswa secara individual inklusivitas ini tergantung pada sekolah,

guru dan seluruh siswa di sekitarnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah ini tentunya dapat diterapkan juga di lingkungan perguruan tinggi yang cakupannya lebih luas dalam memfasilitasi kebutuhan dari mahasiswa berkebutuhan khusus.

Manajemen perguruan tinggi inklusi memberikan kewenangan penuh pimpinan lembaga untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen–komponen pendidikan suatu Perguruan Tinggi yang meliputi mahasiswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Inklusi adalah perguruan tinggi yang menampung semua mahasiswa di kelas yang sama. Perguruan Tinggi ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu Perguruan Tinggi inklusi merupakan tempat setiap anak diterima, menjadi bagian dari kelas maupun dengan anggota masyarakat lainnya agar kebutuhan individu dapat terpenuhi (Diknas PLB, 2007).

Perkembangan pendidikan masa kini mengarah pada model pendidikan inklusi. Hampir semua negara maju telah memberikan penghargaan, perlakuan dan penghormatan terhadap mahasiswa-mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) semakin rinci dan sangat manusiawi. Pendidikan khusus dan layanan khusus juga dikembangkan di Universitas PGRI Banyuwangi sejak tahun 2021 dengan pelaksanaannya yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mahasiswa berkebutuhan khusus mengikuti perkuliahan bersama dengan mahasiswa regular. Perlakuan yang

diberikan sama yang diberikan oleh dosen, dan penerapan metode pembelajaran juga diterapkan secara daring, luring, maupun *hybrid learning*. Namun, yang membedakan model pembelajaran bagi MBK mengikuti kebutuhan dari individu, serta adanya tim shadow, baik dari dosen pendamping maupun mahasiswa.

Berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009, pengertian Pendidikan Inklusi, adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sedangkan, penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi telah difasilitasi pemerintah sejak tahun 2017 dengan adanya Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017, tentang “Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan inklusi adalah Perguruan Tinggi yang menampung semua mahasiswa di kelas yang sama. Perguruan Tinggi ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap mahasiswa maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para dosen, agar mahasiswa-mahasiswa lainnya.

Pengertian pendidikan inklusi memberi gambaran layanan pendidikan yang mengikutsertakan mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) belajar bersama dengan mahasiswa sebayanya di Perguruan Tinggi reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menyemangati pemberian kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai

dengan kebutuhan individu mahasiswa tanpa diskriminasi. Beberapa alasan mengapa pendidikan inklusi harus diimplementasikan antara lain: semua mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan tidak diskriminatif, semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengikuti perkuliahan tanpa melihat kelainan dan kecacatannya, perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua mahasiswa, perguruan tinggi dan dosen mempunyai kemampuan untuk belajar merespons kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Sisi positif implementasi pendidikan inklusi antara lain: membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi sekaligus menghilangkan nilai dan sikap diskriminatif, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memberlakukan analisis situasi pendidikan setempat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mengidentifikasi alasan mereka tidak kuliah (bagi mahasiswa yang belum/tidak kuliah). Implementasi pendidikan inklusi perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: kampus harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keberagaman dan menghargai perbedaan, dosen dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, dosen dituntut melibatkan mahasiswa pendamping (*shadow*) secara bermakna dalam proses pendidikan, kampus harus melibatkan tenaga profesional dalam melakukan asesmen MBK dan memberikan solusi atau tindakan yang diperlukan, termasuk mengidentifikasi, hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap pembelajaran yang aksesibilitas,

melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua mahasiswa.

Merujuk pada peraturan dan kebijakan yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh pemahaman bahwa perguruan tinggi harus menjadi wadah untuk memberikan pendidikan khusus dan layanan khusus bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Mengapa Pendidikan inklusi perlu diterapkan hingga ke jenjang perguruan tinggi, agar calon mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki hingga ke Perguruan Tinggi. Sehingga terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi dalam penyelenggaraan inklusi, yakni: lembaga harus melakukan asesmen atau identifikasi awal bagi calon mahasiswa dengan kondisi khusus untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru secara khusus, sarana dan prasarana yang aksesibilitas bagi MBK, dosen yang dapat memahami karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dari MBK, memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan MBK. Jika aspek-aspek tersebut dapat terlaksana dalam penyelenggara pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi, maka layanan yang dilakukan dalam pembimbingan dan pendidikan dapat dilakukan secara maksimal demi pemenuhan mutu pendidikan yang diharapkan.

B. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- c. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Permenristek Dikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi

C. Dinamika Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi

Konteks pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia guna menjamin keberlangsungan hidupnya seperti, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) tentang semua warga Negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karenanya, negara memiliki peranan penting dalam melaksanakan kewajiban untuk mengakomodasi pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali termasuk kepada mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.

Pasalnya, sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata dalam mengakomodasi dan menghargai keberagaman mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas di lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga dapat menyebabkan timbulnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasarkan pada perbedaan fisik dan status sosial. Adanya stigma negatif tersebut dapat menghambat individu dengan berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan dan keberagaman dalam masyarakat. Berdasarkan realita tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dengan mengimplementasikan Pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi melalui undang-undang yang disusun oleh Kemendiknas.

Pendidikan khusus dan layanan khusus dalam konsep pendidikan inklusi mempunyai makna yang lebih luas daripada sekolah inklusi. Pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di kelas normal bersama dengan teman sebayanya. Sehingga, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan mahasiswa pada umumnya (Kusnia, 2019).

Pendidikan inklusi merupakan salah satu alternatif layanan pendidikan yang dapat mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia dan merupakan pola layanan pendidikan yang memberikan ruang kepada mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menerima pendidikan di kampus-kampus reguler bersama teman

sebayanya, dimana kampus reguler memberi wadah kepada para mahasiswa di kelas yang sama dari berbagai macam karakteristik dan perbedaan kecerdasan sehingga para mahasiswa dapat mengenyam pendidikan secara merata.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan tanpa diskriminasi. Melalui implementasi pendidikan inklusi, diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang dapat berpikir secara inklusi terhadap segala bentuk perbedaan (Saadati dan Sadli, 2019). Konsep inklusi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan mahasiswa tidak serta merta menggabungkan mereka dalam satu kelas ataupun dalam satu sekolah (Suparno et al., 2019). Berkaitan dengan pendidikan inklusi, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum mampu menjangkau semua mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi. Fakta membuktikan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas telah lama termarginalkan dari akses pendidikan yang merupakan salah satu sumber daya penting dalam membentuk sumber daya manusia.

Menurut penelitian yang dilakukan Ro'fah, 2010 yang menyatakan jenjang pendidikan tinggi merupakan jenjang yang paling sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas, disebabkan berbagai faktor diantaranya yaitu masih banyak perguruan tinggi yang tidak menerima mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani, masih adanya asumsi yang kuat di kalangan pemegang kebijakan dunia pendidikan bahwa pendidikan tinggi bukan untuk individu berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, masih banyak institusi pendidikan yang tidak aksesibel terhadap individu

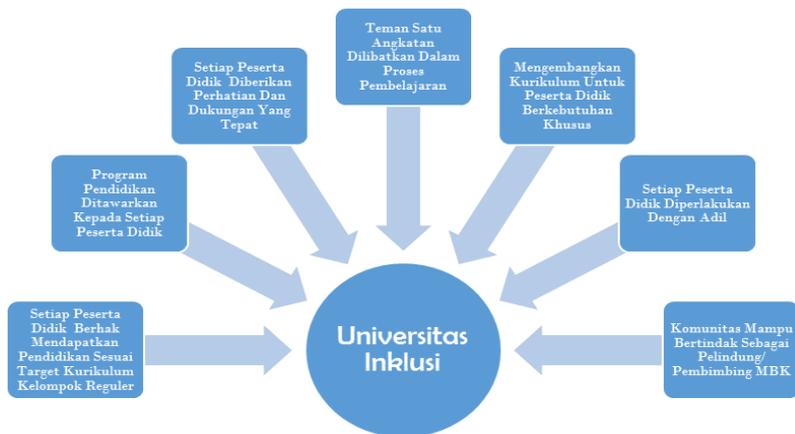
berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, baik kurikulum, media pembelajaran maupun layanan perguruan tinggi seperti perpustakaan, laboratorium dan lembaga bahasa.

Proses perkuliahan merupakan masa di mana seseorang memasuki realita yang jauh berbeda dari masa studi sebelumnya, karena seseorang diharuskan untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Umumnya, mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas mempunyai prestasi akademik lebih rendah dibandingkan mahasiswa reguler. Mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas juga menyelesaikan masa studinya lebih lama daripada mahasiswa reguler. Berdasarkan data dari Komnas HAM, mereka menerima rata-rata 20 laporan terkait disabilitas sekitar 80% atau sedikitnya 16 laporan terkait sikap diskriminasi perguruan tinggi pada penyandang disabilitas (Komnasham, 2016 dalam UU no 8 tahun 2016). Kondisi tersebut menjadi salah satu dampak rendahnya kapital manusia mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas (Michael, 2020).

Psikologi kapital (kekuatan mental) adalah komponen atau modal sebenarnya yang harus ada pada setiap orang. Bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, keterbatasan fisik yang mereka alami terkadang semakin memperburuk kondisi mental mereka. Masalah terbesar yang dihadapi oleh penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus adalah mentalitas dan stigma negatif dari masyarakat sekitar (Daley dan Rappoltschlichtmann, 2018). Lemahnya kekuatan mental (Psikologi Kapital) yang terjadi pada mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus dipicu oleh 3 hal, yakni: pertama, pendekatan pembelajaran yang kurang tepat dalam kegiatan belajar-mengajar di perguruan

tinggi. Kedua, ketidakmampuan penerimaan yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungan. Ketiga, implementasi pembelajaran yang negatif pada lingkungan perguruan tinggi dan keluarga.

Paradigma pendidikan inklusi menjadi langkah progresif dalam menopang kemajuan mutu pendidikan demi terciptanya keterbukaan, persamaan hak bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No 70 tahun 2011 tentang pendidikan inklusif, Pasal 1). Proses pendidikan inklusif memungkinkan semua mahasiswa berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya.



Gambar 1. Implikasi Pendidikan Inklusi Perguruan Tinggi

Implikasi pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi memberikan beberapa keuntungan, sebagai berikut: (1) Memberikan setiap orang kebebasan untuk memilih di mana mereka ingin mengenyam pendidikan. (2) Pendidikan inklusi yang terbaik jika berada dalam kondisi tepat yang berarti terdapat dukungan yang diperlukan, sumber daya dan dosen terlatih harus tersedia. Dosen perlu dimotivasi, untuk mendapat informasi dan memahami kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus. Mereka perlu dilatih dengan baik, memberikan yang dibutuhkan, terkoordinasi antar beberapa pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi. (3) Mahasiswa dan dosen memperoleh keterampilan sosial yang lebih; pengalaman hidup yang lebih luas, belajar tentang bagaimana mengelola pendidikan inklusi secara nyata; dapat berinteraksi bersama teman-teman dengan dan tanpa kebutuhan khusus. (4) Pendidikan inklusi dengan individualisasi,

dukungan khusus adalah persiapan terbaik untuk pendidikan tinggi. (5) Pendidikan inklusi memberikan berbagai keuntungan bagi semua orang, mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, keluarga, masyarakat sekitar.

D. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

1. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Pengertian atau definisi mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Selanjutnya menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di Perguruan Tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa merupakan insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau professional (Undang-Undang No.12 Tahun 2012).

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas (Hartaji, 2012). Menurut Siswoyo (2007) mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak, berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung

melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi. Sedangkan, mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dengan mahasiswa reguler.

Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa (Permenristekdikti RI, No. 46 tahun 2017), mencakup:

a. Tuna netra

Adalah anak membutuhkan media yang digunakan untuk membantu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indra peraba (tunanetra total) ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar (*low vision*). Layanan Pendidikan yang diberikan anak tuna netra membutuhkan pendampingan khusus dengan pendekatan pembelajaran yang pelaksanaannya membutuhkan modifikasi.

b. Tuna rungu

Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Layanan khusus yang diberikan untuk mengurangi dampak dari kelainannya, meliputi layanan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama.

c. Tuna daksa

Gangguan gerak karena kelayuan otot, atau gangguan fungsi syaraf otak (disebut *Cerebral Tunadaksa* adalah individu yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak [tulang, sendi, otot]. Mereka mengalami *Palsy/CP*).

d. Tuna grahita

Tuna grahita (retardasi mental) adalah individu yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Ketunagrahitaan mengacu pada intelektual umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Para tuna grahita mengalami hambatan dalam tingkah laku dan penyesuaian diri. Semua itu berlangsung atau terjadi pada masa perkembangannya.

e. Gangguan komunikasi

Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan.

f. Lamban belajar

Lamban belajar (*slow learner*) adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 78-89). Dalam beberapa hal anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan tunagrahita. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya. Sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus.

g. Kesulitan belajar spesifik

Anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan nyata dalam: pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Kesulitan tersebut bukan bersumber pada sebab-sebab keterbelakangan mental, gangguan emosi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau karena kemiskinan, lingkungan, budaya, ekonomi, ataupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh tenaga pengajar.

h. Gangguan spektrum autisme; dan

Autisme adalah ketidaknormalan perkembangan yang belum ada penyembuhannya. Anak cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, perilaku sosial. Gerakan tubuh berulang-ulang atau adanya pola perilaku tertentu, sulit menerima perubahan pada rutinitas, sehingga membutuhkan layanan dan pendampingan khusus.

i. Gangguan perhatian dan hiperaktif

ADHD/GPPH adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa dengan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan hiperaktif (overaktif). Gejala tersebut harus tampak sebelum usia 7 tahun dan bertahan minimal selama 6 bulan.

Seorang mahasiswa dengan kebutuhan khusus mengacu pada kondisi fisik, mental, atau psikologis yang dapat menghambat pembelajaran di kelas (Lowe, 2016). Mahasiswa dengan kebutuhan khusus, seperti mengalami perbedaan belajar, masalah kesehatan mental, cacat khusus (fisik atau perkembangan), dan bakat adalah mereka yang kebutuhannya ditangani dalam pengaturan ruang kelas. Mahasiswa dengan kebutuhan khusus memerlukan beberapa penyesuaian melalui proses belajar dan lingkungan karena mereka pasti akan menghadapi hambatan dalam berpartisipasi penuh dan efisien ketika proses belajar berlangsung.

2. Identifikasi Bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Kegiatan identifikasi awal bersifat sederhana dan tujuannya ditekankan untuk menemukan (secara kasar) apakah seorang mahasiswa tergolong MBK atau bukan. Maka biasanya identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat (sering berhubungan/bergaul) dengan anak, seperti orang tuanya, pengasuh, dosen dan pihak lain yang terkait dengannya. Sedangkan langkah selanjutnya, dapat dilakukan *screening* khusus secara lebih mendalam yang sering disebut assesmen yang apabila diperlukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional, seperti dokter, psikolog, neurolog, orthopedagog, therapist, dan lain-lain.

Identifikasi pada mahasiswa berkebutuhan khusus diperlukan agar keberadaan mereka dapat segera diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat diberikan. Pelayanan tersebut dapat berupa: penanganan medis, terapi, pendampingan dan pelayanan pendidikan khusus dengan tujuan mengembangkan

potensi mereka. Setiap individu memiliki karakteristik, tanda-tanda kekhususan atau karakteristik yang dapat digunakan oleh dosen untuk mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi, mempunyai pedoman seleksi yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan pedoman yang distandarisasikan bagi PTN maupun PTS yang ada di Indonesia.

Identifikasi awal perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun informasi apakah seorang mahasiswa mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, intelektual, sosial, emosional). Disebut mengalami kelainan/penyimpangan tentunya jika dibandingkan dengan mahasiswa lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Sasaran dari identifikasi, yakni: 1) individu yang telah menjadi mahasiswa aktif di Perguruan Tinggi, 2) individu yang sedang mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi. Pihak yang dapat melakukan proses identifikasi, adalah:

- a) dosen wali
- b) dosen pengampu mata kuliah
- c) dosen pendamping khusus
- d) orang tua
- e) tenaga profesional terkait

3. Kurikulum dalam Pendidikan Inklusi

Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan, sebab itu diantara bidang-bidang pendidikan yaitu: manajemen pendidikan, kurikulum, dan layanan peserta didik. Kurikulum

merupakan bidang yang secara langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Pengembangan kurikulum minimal dapat dibedakan antara “desain kurikulum atau kurikulum tertulis (*design, written, ideal, official, formal, dokumen kurikulum*) dan implementasi kurikulum atau kurikulum perbuatan (*curriculum implementation, curriculum in action, actual curriculum, real curriculum*)”. (Nana Syaodih Sukmadinata, 2003: 1).

Kurikulum pendidikan inklusi pada dasarnya menganut *fleksibel curriculum*, dimana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa, dan dibuat dengan karakteristik dari lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri, tanpa mengesampingkan pedoman yang telah ada. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi itu sendiri hendaknya menumbuhkan kemandirian, berpikir kritis, dan dapat membangkitkan nilai-nilai kebersamaan dalam lingkungan pendidikan. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, tidak seperti yang terjadi selama ini, dimana mahasiswa dipaksakan mengikuti kurikulum. Kurikulum yang sesuai dengan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum mahasiswa reguler yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus.

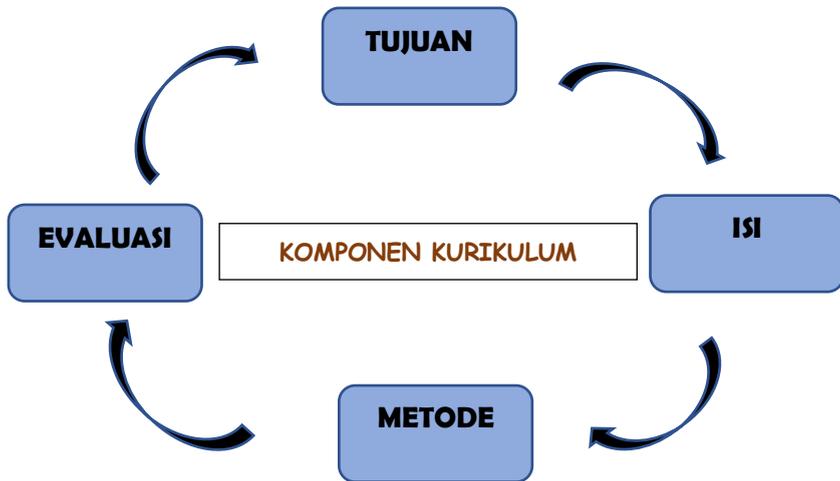
Prinsip-prinsip penyesuaian kurikulum dalam sistem pendidikan inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut: (1) Menggunakan kurikulum reguler untuk pembelajaran bagi mahasiswa yang mampu mengikuti materi kurikulum reguler, (2) Sebagian menggunakan kurikulum reguler, dan sebagian lagi menggunakan kurikulum yang telah disesuaikan untuk pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, (3)

Penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran untuk mahasiswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau berbakat dilakukan dengan cara menambah indikator, materi pokok dengan materi untuk kelas berikutnya, menggunakan sepenuhnya materi dari kelas berikutnya, (4) Penyesuaian kurikulum dan materi pembelajaran untuk mahasiswa yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pembelajaran, menyederhanakan atau mengurangi materi pokok, (5) Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, bersama-sama dengan DPK, mahasiswa berkebutuhan khusus, orang tua MBK, dan ketua Prodi, (6) Memperhatikan potensi dan kondisi lingkungan alam dan masyarakat sekitar untuk dapat digunakan sebagai tempat materi atau sumber dan media atau alat pembelajaran.

Modifikasi tersebut dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Kurikulum pada pendidikan inklusi hendaknya memberikan peluang terhadap tiap mahasiswa untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Disamping dosen pengampu mata kuliah dan dosen pendamping khusus (DPK), dalam penyusunan kurikulum pendidikan inklusi ini, orang tua hendaknya turut dilibatkan dalam proses perencanaannya, walaupun di jenjang perguruan tinggi peran orang tua penting dalam keberlangsungan proses perkuliahan mahasiswa berkebutuhan khusus.

Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan dari kurikulum itu sendiri ada 4 (empat) macam, yaitu: (1)

komponen tujuan, yang berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan, (2) komponen isi/materi pembelajaran, (3) komponen metode, yang berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, dan (4) komponen evaluasi, meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Hamalik, 2014). Komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada gambar, berikut:



Gambar 2. Sistem Kurikulum

Kurikulum disusun dan dipakai dalam dunia pendidikan pada intinya dapat membentuk perilaku peserta didik, sehingga kurikulum selalu terkait dengan pendidikan pada tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi. Kurikulum bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang menaunginya yang bertujuan untuk membentuk perilaku peserta didik. Namun, kurikulum pada mahasiswa regular dengan mahasiswa berkebutuhan khusus walaupun memiliki

kesamaan tetapi ada sedikit perbedaan, misalnya pada penilaian atau evaluasinya.

Mahasiswa reguler dan mahasiswa berkebutuhan khusus, pastinya mempunyai kesulitan dalam memahami dalam materi perkuliahan. Akan tetapi terdapat perbedaan pada tingkat pemahaman dan kesulitan yang dialami, kondisi tersebut terkadang tidak dipahami oleh dosen wali maupun dosen pengampu mata kuliah, sehingga penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus tidak dapat terpenuhi (Aslan, 2017). Dosen dalam memberikan pengajaran, tentunya mempunyai kompetensi dan indikator capaian yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, mahasiswa berkebutuhan khusus membutuhkan layanan dan pendampingan khusus untuk memberikan bantuan atas ketidakmampuan atau kekhususannya agar dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.

Implementasi merupakan unsur penting dalam proses perencanaan, yang terdiri dari pelaksanaan, praktik dan penerapan. Proses perencanaan yang dimaksud meliputi silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam kurikulum mahasiswa berkebutuhan khusus disesuaikan dengan karakteristik kekhususan mereka. Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, tidak terlepas dari peran dosen dan Lembaga Pendidikan. Dosen harus jeli melihat kondisi dan kebutuhan anak didiknya. Evaluasi yang dilakukan tidak terlalu mementingkan penilaian kognitif, tetapi kondisi afektif dan psikomotor menjadi indikator keberhasilan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Sehingga dosen perlu melakukan rekonstruksi pada model strategi pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

4. Tenaga Pengajar atau Dosen

Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. (Direktorat PLB, 2007:20). Peran dosen dalam pembelajaran di kelas mempengaruhi interaksi antara dirinya dengan mahasiswa. Salah persepsi dalam memahami karakteristik tiap mahasiswa di dalam kelas dapat menghambat pengembangan pengajaran, sebaliknya kemampuan dosen dapat membantu kelancaran pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dosen dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, sebagai berikut:

- a) Dosen melakukan *assessment* sebelum kelas dimulai perihal kebutuhan dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- b) Dosen menyediakan materi yang aksesibel seperti *softfile* buku (*e-book*), konversi materi dalam format dokumen Word, audiobook, dan-lain-lain.
- c) Menyusun program pembelajaran individual (PPI) bersama-sama dengan dosen pembimbing khusus (DPK).
- d) Saat awal perkuliahan, dosen mengkondisikan kelas dan menginfokan bahwa di kelas terdapat mahasiswa berkebutuhan

khusus sehingga mahasiswa lain dalam kelas akan berusaha membantu mengakomodasi mereka.

- e) Dosen menanyakan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus pada setiap akhir penjelasan di dalam kelas baik daring maupun luring terkait pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.
- f) Dosen memastikan partisipasi dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk bertanya, presentasi, dan lain-lain dengan memberikan waktu yang lebih lama atau menghargai pendapat mereka.
- g) Memberikan tugas pengganti apabila tugas yang telah diberikan tidak mampu dilakukan, contohnya tugas membuat video observasi perilaku anak usia dini di sekitar rumah diganti dengan membuat esai tentang cara belajar anak usia dini dalam kelas.
- h) Jika memungkinkan, dosen menyampaikan materi dengan intonasi dan pengucapan yang jelas dengan memastikan kondisi jaringan internet jika diterapkan pembelajaran daring.
- i) Apabila memungkinkan, sebaiknya perincian tugas dapat disampaikan di awal dan ditulis melalui media seperti: *Google Classroom*, *e-mail*, *LMS*, *Wa Group*. Dengan demikian, mahasiswa berkebutuhan khusus dapat selalu mengikuti dan mengecek format serta bentuk tugas yang diberikan dalam satu semester.
- j) Jika dosen menggunakan *group chatting* dengan media sosial, pastikan bila media sosial tersebut dapat diakses, baik di HP maupun di laptop.
- k) Membangun sistem koordinasi antara dosen pengampu mata kuliah, DPK, pihak perguruan tinggi, orang tua dan mahasiswa

dalam memberikan bantuan layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas

- 1) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian dosen.

5. Kegiatan Pembelajaran

Proses pembelajaran mempunyai tujuan yang beragam, acuan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentunya juga beragam. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus dengan pendidikan inklusi, yakni: 1) mahasiswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan mahasiswa reguler dalam satu kelas, 2) mahasiswa berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler, namun terdapat modifikasi pada alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas, 3) dosen pengampu mata kuliah yang sama dengan mahasiswa reguler, hanya saja ada DPK yang mendampingi jika mahasiswa mengalami kesulitan dalam belajar, 4) sarana prasarana yang aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Sistem pembelajaran merupakan bagian penting untuk mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Sistem pembelajaran yang baik mampu memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuka potensi dirinya dalam meng-

internalisasikan *knowledge, skills* dan *attitudes* serta pengalaman belajar sebelumnya. Dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program Studi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kualifikasi KKNI. Demikian pula sistem penjaminan mutu pendidikannya mesti mampu mengendalikan proses pendidikan dengan baik merujuk pada level kualifikasi KKNI.

Proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi telah diatur dalam pasal 8 PERMENDIKNAS No.7 tahun 2009 yang diuraikan, sebagai berikut: pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Implementasi pendidikan inklusi dibutuhkan tenaga pendidik sangat berperan penting untuk mewujudkan cita-cita dari pendidikan inklusif. Untuk itu, tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusif sangat diperlukan agar terciptanya kondisi kelas yang ramah terhadap anak berkebutuhan khusus. Namun masalah yang dihadapi saat ini masih banyak tenaga pendidik yang belum memahami tentang pendidikan inklusif.

Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien. Pembelajaran dapat dipandang melalui dua sudut pandang, *pertama* pembelajaran merupakan suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang terstruktur antara lain: tujuan pembelajaran, media pembelajaran, strategi, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan tindak lanjut pembelajaran berupa remedial dan pengayaan. *Kedua*, pembelajaran merupakan suatu proses, maka pembelajaran

merupakan kegiatan dosen dalam rangka membuat mahasiswa untuk belajar. Proses tersebut meliputi:

1. Persiapan dari mulai merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan perencanaan mengajar dilengkapi dengan persiapan media belajar dan evaluasi.
2. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada persiapan-persiapan pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola yang berbentuk pengayaan atau penambahan jam mata pelajaran, dan remedial bagi mahasiswa yang mendapatkan kesulitan dalam belajar.

Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan inklusi di perguruan tinggi berdasarkan perencanaan dirancang dalam sebuah pengajaran guna mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program pengajaran adalah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan peraturan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup pengaturan tentang tujuan, isi, proses dan evaluasi. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya adalah kurikulum standar nasional yang berlaku lembaga pendidikan pada umumnya. Namun, karena keberagaman hambatan yang dialami oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, mulai dari yang ringan sampai berat, maka dalam implementasinya kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional perlu dilakukan modifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Adanya keberagaman kondisi mahasiswa, maka dalam implementasinya kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional perlu dilakukan modifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi inklusi berlangsung dengan pendekatan, bahan ajar dan media yang sesuai kebutuhan setiap mahasiswa. Proses pembelajaran pendidikan inklusi menuntut dosen untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menyajikan materi perkuliahan. Selain itu, dosen juga harus mampu untuk manajemen kelas agar tercipta kondisi yang efektif. Dosen dapat mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa yang mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Evaluasi dan Penilaian

Kemajuan belajar pada mahasiswa berkebutuhan khusus dapat dilihat dari hasil prestasi akademik dan keaktifan dalam mengikuti proses perkuliahan. Evaluasi perlu dilakukan secara kontinyu untuk mengetahui apakah model inovatif pembelajaran dan program pendampingan khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu mahasiswa tidak mengalami kemajuan yang signifikan (berarti), maka perlu dilakukan tinjauan kembali pada perlakuan yang telah diberikan. Beberapa hal yang perlu ditelaah apakah diagnosis yang kita buat tepat atau tidak, begitu pula dengan implementasi model inovasi pembelajaran yang digunakan sesuai atau tidak, dll. Sebaliknya, apabila intervensi yang diberikan menunjukkan kemajuan yang

cukup signifikan maka pemberian layanan atau intervensi diteruskan dan dikembangkan.

Penilaian dalam setting pendidikan inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu:

- a. Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian berlaku pada Perguruan Tinggi reguler.
- b. Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang telah dimodifikasi Perguruan Tinggi disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan mahasiswa.
- c. Apabila menggunakan kurikulum dengan model inovasi pembelajaran secara individual, maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (*base line*).

Evaluasi dalam setting pendidikan inklusi ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu:

- a. Bagaimana pemahaman saudara mengenai materi perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah?
- b. Jelaskan kendala yang dialami selama mengerjakan tugas-tugas?
- c. Bagaimana peran *shadow* baik dari dosen pendamping khusus maupun mahasiswa?
- d. Jelaskan perasaan saudara ketika berhasil menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah?

7. Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusi

Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus.

Aksesibilitas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi. Aksesibilitas terdiri dari aksesibilitas fisik dan nonfisik. Aksesibilitas fisik adalah kemudahan setiap mahasiswa untuk masuk dan ke luar dalam lingkungan, lahan, area, jalan dan ruang atau bangunan. Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah suatu akses yang diberikan berkaitan dengan program atau sistem untuk semua orang agar dapat masuk dan keluar dengan mudah berkaitan dengan program atau sistem tersebut. Akses memiliki arti suatu hal yang dapat dikaitkan dan dijadikan akses dapat dikatakan bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi. Akses yang baik dapat ditentukan dari kualitas sumber daya manusia. Dalam artian, ketika sumber daya manusianya sangat baik, maka dengan sendirinya akan menciptakan peluang mendapatkan akses yang lebih baik, begitupun sebaliknya. Jadi ketika memiliki sebuah prestasi maka secara otomatis akan mendatangkan sebuah *prestige*. Hal tersebut dikategorikan sebagai

pencapaian kepuasan kinerja yang maksimal dalam implementasinya terhadap pendidikan inklusi.

Sedangkan aksesibilitas dalam bentuk fisik yang sekiranya dapat menunjang pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi ialah tersedianya sarana dan prasarana yang sangat memadai di berbagai sektor kehidupan baik di sektor kesejahteraan sosial, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan fasilitas umum lainnya untuk melengkapi pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi. Selain itu, akses dalam bentuk nonfisik seperti ketersediaan kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, terdapat peluang memperoleh pekerjaan yang layak dan sepadan dengan kompetensi, dan terciptanya lingkungan yang aman.

Seperti misalnya akses jalan, perpustakaan, ruang tunggu (bagi pengantar/perawat mahasiswa berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas), *public space*, profesionalitas layanan akademik, ketersediaan tangga untuk gedung bertingkat atau lift, dan lain sebagainya yang bersifat umum untuk khalayak banyak dan ketersediaan fasilitas-fasilitas khusus atau hanya dapat digunakan oleh penyandang cacat atau disabilitas saja, dalam artian orang yang tidak menyandang disabilitas tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas tersebut, seperti misalnya WC (kamar mandi), dan lain sebagainya yang sekiranya khusus hanya untuk penyandang cacat atau disabilitas saja.



BAGIAN III

COOPERATIVE POSITIVE LEARNING (CPL)



Realita yang terjadi di Prodi Bimbingan Konseling di Universitas PGRI Banyuwangi telah mendorong, tim dosen untuk mendesain model inovasi pembelajaran dan

aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, utamanya bagi mahasiswa lamban belajar (*slow learner*). Desain model inovasi pembelajaran yang telah dimodifikasi berdasarkan kondisi mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) ini disebut dengan *Cooperative positive learning* (CPL). CPL merupakan model pembelajaran yang didesain untuk memberi ruang bagi mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) dalam meningkatkan motivasinya ketika mengikuti proses perkuliahan di Perguruan Tinggi. Layanan khusus yang diberikan dalam bentuk pendampingan khusus bagi lamban belajar (*slow learner*) merupakan salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kondisi mental mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) agar dapat menyelesaikan masa studinya hingga akhir.

Sebelum melangkah pada pembahasan langkah-langkah implementasi CPL, akan diuraikan secara ringkas mengenai karakteristik dari mahasiswa lamban belajar (*slow learner*), sebagai berikut:

1. Nilai indeks prestasi kumulatif (Ipk) yang diperoleh kurang dari 2,75.
2. Menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan mahasiswa lainnya.
3. Prestasi akademik dalam semester berturut-turut tidak mengalami peningkatan.
4. Daya tangkap terhadap materi perkuliahan lambat.
5. Memiliki potensi intelektual sedikit di bawah individu normal (memiliki IQ sekitar 80-85).
6. Membutuhkan waktu belajar lebih lama dan berulang-ulang
7. Mengalami kesulitan dalam beradaptasi tetapi lebih baik dari tunagrahita.

A. Konsep Dasar *Cooperative Positive Learning* (CPL)

Proses pembelajaran merupakan upaya secara sistematis yang perlu dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif jika terjadi transfer belajar, berupa materi belajar yang diberikan oleh dosen dan kemudian diserap ke dalam struktur kognitif mahasiswa. Penyerapan materi tersebut membutuhkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Ketidaksihesuaian dalam penerapan metode pembelajaran dapat menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam mencerna materi yang diberikan oleh dosen.

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sehingga, metode pembelajaran juga dapat diartikan suatu pendekatan atau strategi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan motivasi pada mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan mempermudah pemahaman pada materi perkuliahan. *Cooperative Positive Learning* (CPL) merupakan sebuah pendekatan pembelajaran dengan perwujudan proses belajar mengajar berpusat pada mahasiswa, terutama dalam mengatasi permasalahan pada mahasiswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, yakni dosen atau mahasiswa lainnya, mahasiswa yang pasif, agresif dan tidak peduli pada orang lain.

Pembelajaran adalah suatu proses belajar yang kompleks dengan melibatkan berbagai unsur secara dinamis. Pendekatan CPL

menerapkan konsep psikologi positif untuk membangun kekuatan mental pada mahasiswa yang dilakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak, diantaranya dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. CPL dikembangkan atas dasar konsep psikologi positif (Seligman dan Csikszentmihalyi, 2000) yang menekankan pada pentingnya membangun kekuatan positif pada aspek psikologis dan mental. Membangun kepribadian yang kuat itulah tujuan utama dari dikembangkannya psikologi positif (Seligman et al., 2009), dalam konteks pembelajaran, menerapkan konsep psikologi positif memberi begitu banyak manfaat bagi mahasiswa (Shoshani dan Slone, 2017).

Penerapan psikologi positif dalam konteks pembelajaran akan memberikan manfaat, sebagai berikut: membangun sikap positif dan mental yang kuat bagi mahasiswa (Shoshani dan Slone, 2017), menciptakan lingkungan belajar yang positif di dalam kelas (Seligman et al., 2009), mampu membangun orientasi akademik yang positif (Shankland dan Rosset, 2016), menciptakan suasana gembira di lingkungan perguruan tinggi dan kepribadian yang positif (Kristjánsson, 2012), dan yang paling penting meningkatkan kekuatan mental terkait dengan rasa percaya diri, daya tahan, sikap optimis dan harapan yang kuat (Kristjánsson, 2012; Luthans et al., 2004; Nolzen, 2018).

Konsep dasar psikologi positif adalah membangun hal positif pada aspek mental, kepribadian untuk kehidupan yang lebih baik (Seligman dan Csikszentmihalyi, 2000). Perwujudan kepribadian yang positif pada mahasiswa dalam dunia pendidikan membutuhkan adanya intervensi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan kaidah psikologi positif (Seligman et al., 2009; Shoshani dan Slone, 2017). Konsep psikologi positif sangat relevan

diterapkan sebagai sebuah pedoman dalam pembelajaran untuk mahasiswa kebutuhan khusus, terutama lamban belajar atau *slow learner*. Penerapan konsep ini dalam kegiatan pembelajaran diharapkan mampu membangun kekuatan mental pada diri mahasiswa. Dalam konteks ini, konsep baru yang disebut dengan pendekatan *Cooperative Positive Learning* (CPL) merupakan sebuah pendekatan komprehensif mengenai konsep *cooperative learning* yang dikombinasikan dengan konsep psikologi positif.

Menurut Prasetyo (2018) ada 5 prinsip dasar dalam implementasi *positive learning*. Pertama, dosen sebagai *role model*. Kedua, menciptakan komitmen yang kuat dengan mahasiswa untuk menjaga agar lingkungan kelas tetap positif. Ketiga, saling menghargai. Keempat, semua hal sedang berproses menuju baik, dan yang ke lima adalah membangun sudut pandang positif dari setiap tindakan, peristiwa dan realita. Kelima prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam penerapan pembelajaran berbasis psikologi positif. Dosen merupakan kunci penting dalam kegiatan pembelajaran (Mudzielwana, Mbulaheni, dan Kutame, 2017). Sikap dosen, keyakinan dosen, dan apapun yang dilakukan dosen akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung (Lu et al., 2016). Semakin positif sikap dosen dan keyakinan dosen terhadap dirinya sendiri dan mahasiswanya, semakin baik pengaruhnya secara langsung terhadap kesehatan mental para siswa (Zee Koomen, 2016). Oleh karena itu, CPL tidak mungkin dapat tercipta tanpa sikap dan pandangan positif dosen, baik terhadap mahasiswa, satuan pendidikan dan dirinya sendiri.

Prinsip kedua dan ketiga saling berhubungan, yakni terkait dengan komitmen menciptakan suasana positif di kelas dan sikap saling menghargai. Lingkungan kelas yang positif membuat

mahasiswa lebih nyaman, bahagia dan mudah untuk belajar (O'Brien Blue, 2017). Dalam konteks inilah peran dosen sangat penting. Terlebih bagi para mahasiswa disabilitas terkadang mereka akan menerima stigma negatif dari teman dan lingkungannya (Daley dan Rappolt-schlichtmann, 2018). Komitmen ini dibangun dengan menumbuhkan sikap menghargai untuk mewujudkan pembelajaran positif.

Prinsip keempat dan kelima juga saling berurutan. Tim pengusul harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu sedang berjalan menuju baik. Sementara di setiap realita, fakta dan permasalahan selalu ada sisi positif. Terkait dengan kedua konsep tersebut, maka perlu dibangun kesadaran bahwa setiap orang, setiap hal hakekatnya menuju kepada kebaikan dan pasti ada sisi baiknya (Prasetyo, 2018) prinsip ini menjadi pedoman bagi dosen ketika menjalankan sebuah kegiatan pembelajaran.

CPL juga memiliki 6 karakter dasar. Pertama, *positive opening*, kedua *positive questioning*, ketiga *positive measuring*, keempat *positive collaborative*, kelima *positive statement* dan keenam *positive closing*. Kekuatan terpenting dari psikologi positif adalah penggunaan bahasa yang positif (Seligman et al., 2009). Oleh karenanya, membuka kelas, bertanya, menyampaikan pernyataan, ataupun menutup kelas hendaknya menggunakan bahasa, perilaku dan sikap yang positif. Hal-hal inilah sejatinya yang menjadi dasar dari karakteristik pendidikan yang positif menurut pandangan psikologi positif (Lu et al., 2016; O'Brien dan Blue, 2017).

CPL diterapkan dengan tiga (3) tahapan implementasi. Pertama, *mapping* yaitu dosen mengenali dengan teliti bagaimana

karakter mahasiswa mereka. Dosen mengelompokkan mahasiswa yang setara dan memiliki kondisi yang hampir sama. Hasil *mapping* digunakan untuk membuat penilaian yang bersifat individual. Artinya setiap mahasiswa akan mendapatkan perlakuan dan penilaian yang cenderung berbeda dengan mahasiswa lain (Cavendish dan Connor, 2018). Hasil *mapping* digunakan untuk menyusun desain pembelajaran dan perlakuan yang relevan bagi tiap individu, termasuk standar penilaian (Scanlon et al., 2018).

Setelah tahap pemetaan, maka hasil pemetaan digunakan sebagai pertimbangan untuk menyusun pembelajaran individual atau kelompok pada mahasiswa. Tahap kedua yang dilalui adalah *caching*. *Caching* memiliki makna bahwa mahasiswa mampu menangkap apa yang ia pelajari dengan sempurna. Pembelajaran tidak perlu banyak, tidak perlu luas, sedikit demi sedikit jauh lebih baik asalkan siswa dapat menguasai. Target dari proses ini adalah mahasiswa mampu walaupun sedikit. Walaupun hanya bisa belajar satu huruf itu jauh lebih baik daripada mereka mendapatkan begitu banyak materi namun menguap, untuk mewujudkan hal ini memang tidaklah mudah. Tahap ketiga yang terakhir dilakukan *upgrading*.

Secara perlahan pembelajaran dilakukan untuk peningkatan kualitas, target dan materi secara bertahap. Pendekatan CPL sebagai sebuah pendekatan yang dikembangkan dari konsep psikologi positif diyakini dapat menumbuhkan PsyCap pada mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus. Pendekatan CPL ini dapat diimplementasikan dengan berbagai model pembelajaran yang telah ada. PsyCap yang terdiri dari empat aspek, yakni efikasi diri, harapan, sikap optimis dan daya tahan. Rasa percaya diri memberikan kekuatan yang besar bagi para siswa untuk mencapai

tujuan dan target yang telah ditetapkan, dalam konteks ini terkait dengan capaian akademik (Bandura, 1993). Kesuksesan yang diraih mahasiswa secara akademik sangat berhubungan erat dengan rasa percaya dirinya (Levi et al., 2013). Harapan juga turut menjadi penentu capaian dan target yang telah ditentukan (Levi et al., 2013; Luthans et al., 2004). Kegagalan seseorang hanya terjadi ketika ia berhenti, selama seseorang masih mau berusaha ia pasti akan berhasil. Kemampuan untuk berusaha dan terus mencoba inilah yang dikenal sebagai daya tahan. Dengan kata lain, daya tahan merupakan kunci dari sebuah kesuksesan (Luthans et al., 2004).

Keinginan melanjutkan pendidikan untuk merubah masa depan yang lebih baik hingga perguruan tinggi menjadi salah satu keyakinan atas usaha yang telah dilakukan oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, sehingga motivasi tersebut perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari berbagai kalangan masyarakat terutama pemangku kebijakan terkait Pendidikan dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Menurut Bandura, proses perubahan psikologis dan perilaku individu berfungsi melewati perubahan perasaan dari penguasaan pribadi atau keyakinan diri pada individu disebut dengan *self efficacy* (Nurdibyanandaru dan Aulia, 2020). *Self efficacy* akan memengaruhi bagaimana orang-orang merasakan, berpikir, memotivasi diri sendiri, dan bertindak. *Self efficacy* dibutuhkan mahasiswa untuk bertahan dan menyelesaikan proses pembelajaran selama menempuh masa studi di Perguruan Tinggi.

Individu yang optimis percaya bahwa peristiwa buruk hanya berlangsung sementara, terjadi pada hal-hal tertentu, dan tidak menyalahkan diri sendiri ketika mengalami peristiwa buruk.

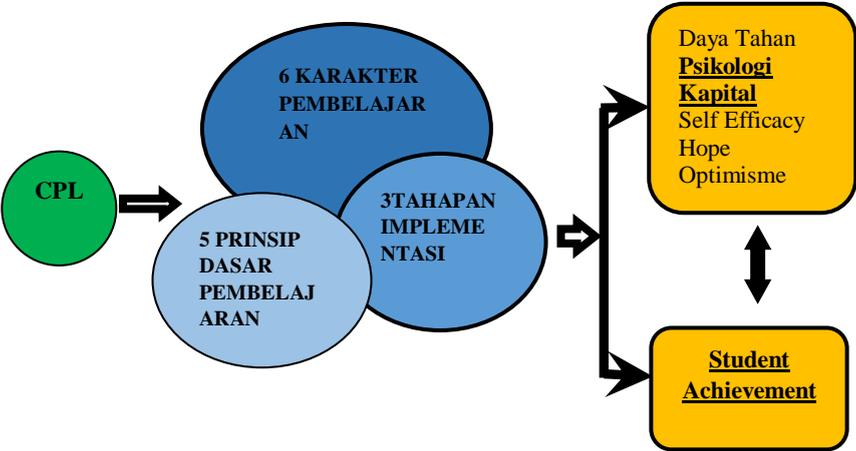
Sebaliknya ketika mengalami peristiwa baik individu yang optimis percaya bahwa peristiwa akan berlangsung menetap, akan terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan dirinya menjadi sumber penyebab peristiwa baik. Misalnya, individu yang mengalami kegagalan akan berkata pada dirinya “Kekalahan saya dalam mengikuti pertandingan hari ini tidak akan mempengaruhi saya pada pertandingan-pertandingan lain. Hari ini saya kalah hanya karena kurang latihan sebelum bertanding, jika saya latihan lebih giat lagi tentunya hasil yang diperoleh lebih baik”. Sedangkan, dalam peristiwa baik, individu optimis akan berkata, “keberhasilan hari ini merupakan hasil dari kerja sama tim yang baik dan saya yang rajin latihan sebelum pertandingan”.

Pencapaian *student academic achievement* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kualitas dosen dan pilihan pendekatan pembelajaran yang tepat (Takeda dan Lamichhane, 2018). Tim pengusul lain beranggapan bahwa kualitas dosen merupakan penentu utama keberhasilan pencapaian akademik mahasiswa jika dibandingkan dengan faktor lain (Cunningham et al., 2018). Pendapat yang berbeda menyebutkan bahwa faktor psikologis mahasiswa (*hope, self efficacy* dan emosional) menjadi kunci penting bagi ketercapaian capaian akademik siswa (Levi et al., 2013). Kestabilan dari aspek-aspek psikologis tersebut menjadi kekuatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan masa studi di Perguruan Tinggi hingga akhir.

B. Rancangan Model Cooperative Positive Learning (CPL)

Penerapan Model CPL dapat diimplementasikan bagi mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) dengan memperhatikan 5

prinsip dasar dalam implementasi *positive learning*, memiliki memiliki 6 karakter dasar, dan diterapkan dengan tiga (3) tahapan implementasi. Psikologi Kapital (PsyCap) merupakan kunci keberhasilan dari pengembangan model CPL. Keterlibatan dan kualitas dosen serta pilihan pendekatan pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi *student academic achievement* mahasiswa lamban belajar (*slow learner*). Berikut rancangan model inovasi pembelajaran yang akan dihasilkan yakni pendekatan dengan model *Cooperative Positive Learning* (CPL).



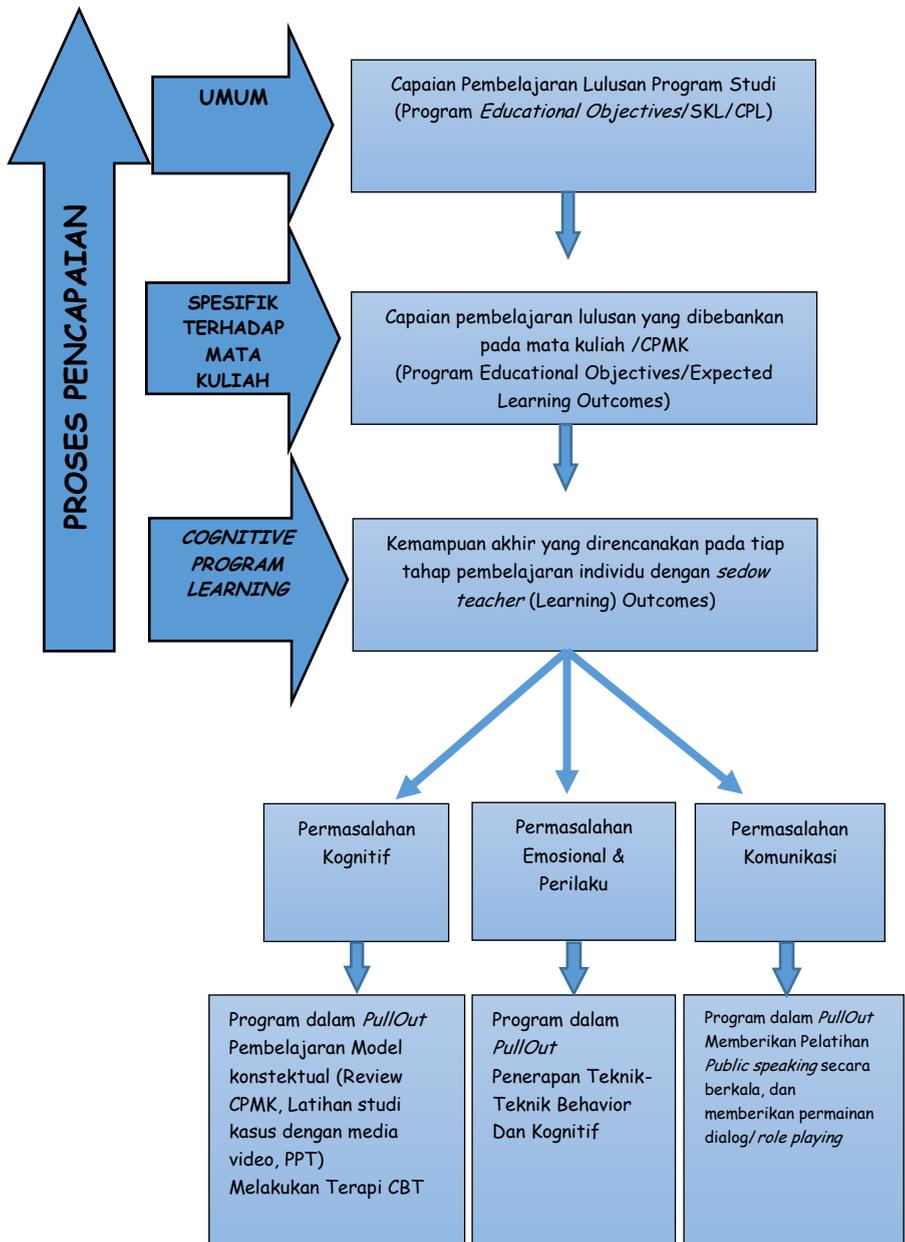
Gambar 2. Pendekatan dengan Model *Cooperative Positive Learning* (CPL)

Pencapaian keberhasilan akademik mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) melalui pengembangan model CPL dapat diukur secara objektif. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran individu dengan *shadow teacher*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim penulis, adapun indikator keberhasilan belajar mahasiswa lamban belajar

(*slow learner*) dengan menggunakan model CPL, dapat diukur menjadi tiga bagian sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran, proses pembelajaran dikatakan berhasil jika apa yang telah direncanakan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) terlaksana 75% – 100% di setiap siklus.
2. Hasil belajar, mahasiswa dikatakan berhasil dalam pencapaian belajar, jika mahasiswa memperoleh $Ipk \geq 3,00$ tiap semester.
3. Peningkatan *soft skill* mahasiswa pada kegiatan non akademik.

Indikator keberhasilan capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi yang dibebankan pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK), dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Panduan indikator keberhasilan pengembangan model CPL bagi mahasiswa lamban belajar (*slow learner*).

C. Langkah-Langkah Penugasan dalam Implementasi Model *Cooperative Positive Learning* (CPL)

Adapun implementasi model CPL dibagi menjadi empat penugasan dengan tingkat kesulitan yang berbeda pada tiap tugasnya, yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) dalam mengerjakan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan muncul dalam mengerjakan tiap-tiap tugas, berikut dijabarkan langkah-langkah penugasannya:

1. Penugasan 1 (*Who Am I?*)

Langkah-langkah penugasan:

- a. Pendamping melakukan *probing* awal dengan mahasiswa
- b. Mahasiswa diminta untuk menuliskan semua kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.
- c. Data diri mahasiswa (kelebihan dan kekurangan) disajikan dalam bentuk materi dan dibuat dengan model *mind mapping* dalam bentuk PPT.
- d. Pada pertemuan berikutnya mahasiswa diminta untuk presentasi hasil pembuatan materi di depan dosen pendamping dan juga tim *sedow*.
- e. Setelah selesai penugasan maka dosen pendamping melakukan sesi konseling/terapi bersama mahasiswa.
- f. Refleksi diri (dengan menuliskan perasaan setelah melakukan kegiatan).

Dalam materi pertama memiliki manfaat untuk meningkatkan kognitif mahasiswa dengan berpikir konkret dan lebih terstruktur dalam sebuah penyajian dan penyampaian laporan atau informasi.

2. Penugasan 2 (*I Can See it*)

Langkah-langkah penugasan:

- a. Mahasiswa diminta untuk melihat beberapa film edukatif sesuai tema yang telah disediakan oleh tim pendamping.
- b. Mahasiswa diminta untuk mereview perasaan yang tergambar dalam film tersebut dengan menunjukkan data pendukung (dalam alur cerita kasus/permasalahan/ adegan film).
- c. Data diri hasil review film disajikan dalam bentuk materi dan PPT
- d. Pada pertemuan berikutnya mahasiswa diminta untuk presentasi hasil pembuatan materi di depan dosen pendamping dan juga tim *shadow*.
- e. Setelah selesai penugasan maka dosen pendamping melakukan sesi konseling/terapi bersama mahasiswa.
- f. Refleksi diri (dengan menuliskan perasaan setelah melakukan kegiatan)

Dalam materi kedua memiliki manfaat untuk manajemen emosi dan meningkatkan kognitif mahasiswa dengan berpikir konkret dan teliti, dalam sebuah analisa kasus.

3. Penugasan 3 (*My Wonderfull Culture*)

Langkah-langkah penugasan:

- a. Mahasiswa diminta untuk menceritakan proses capaian pengalaman hidup \pm 3 tahun lalu dan harapan ke depan dalam tempo \pm 3 tahun.

- b. Mahasiswa diminta untuk membuat dokumenter capaian hidup, pengalaman atau prestasi.
- c. Data diri hasil dokumenter hidup disajikan dalam bentuk video
- d. Pada pertemuan berikutnya mahasiswa diminta untuk presentasi hasil pembuatan video di depan dosen pendamping dan juga tim *sedow*.
- e. Setelah selesai penugasan maka dosen pendamping melakukan sesi konseling/terapi bersama mahasiswa.
- f. Refleksi diri (dengan menuliskan perasaan setelah melakukan kegiatan)

Dalam materi ketiga memiliki manfaat untuk melatih manajemen emosi, meningkatkan komunikasi pada mahasiswa baik secara verbal maupun non verbal, meningkatkan kreativitas berpikir dan menjaga kestabilan *student achievement* pada mahasiswa.

4. Penugasan 4 (*I Am Promise*)

Langkah-langkah penugasan:

- a. Mahasiswa diminta untuk membuat target capaian jangka pendek dalam tempo ± 2 minggu.
- b. Mahasiswa diminta untuk membuat kontrak diri dengan memberikan *reinforcement* untuk target diri.
- c. Data kontrak diri disepakati bersama dosen pendamping dan diketahui Kaprodi Bimbingan Dan Konseling.
- d. Mahasiswa menuliskan, serta melaporkan kendala dalam proses pencapaian target.

- e. Pada pertemuan terakhir mahasiswa diminta untuk presentasi hasil projek jangka pendek.
- f. Setelah selesai penugasan maka dosen pendamping melakukan sesi konseling/terapi bersama mahasiswa.
- g. Refleksi diri (dengan menuliskan perasaan setelah melakukan kegiatan)

Dalam materi keempat memiliki manfaat untuk melatih manajemen emosi, kognitif, komunikasi dan meningkatkan teknik strategi tindakan pencapaian diri mahasiswa.



BAGIAN IV

PENUTUP

Pengembangan Model *Cooperative Positive Learning* (CPL) dalam Pendidikan Inklusi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kekuatan mental mahasiswa disabilitas/berkebutuhan khusus, terutama dengan karakteristik lamban belajar (*slow learner*) di Perguruan Tinggi. Penerapan CPL disusun bukan hanya bagaimana mengoperasikan proses belajar mengajar yang positif, namun juga upaya menciptakan *positive holistic environment*. Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi melalui Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Dan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif) Untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus mencoba menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan terutama bagi mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) yang ada di Universitas PGRI Banyuwangi, khususnya Prodi Bimbingan Konseling.

Kemandirian dan kekuatan mental pada mahasiswa mahasiswa lamban belajar (*slow learner*) dapat terbentuk dengan adanya dukungan dari semua pihak khususnya dari negara melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Allen, A. A., Poch, A. L., dan Lembke, E. S. (2018). An Exploration of Alternative Scoring Methods Using Curriculum-Based Measurement in Early Writing. *Learning and Instruction*, 41(2), 85–99. <https://doi.org/10.1177/0731948717725490>
- Autio, E., Keeley, R., Klofsten, M., Parker, G. G. dan Hay, M. (2001). Entrepreneurial Intent among Students in Scandinavia and in the USA. *Enterprise and Innovation Management Studies*, 2(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/14632440110094632>
- Bandura, A. (1993). Perceived-Self-Efficacy-in-Cognitive-Development-and-Functioning. *Educaion Psychologist*, 28(2), 117–148.

- Bellò, B., Mattana, V., dan Loi, M. (2018). The power of peers: A new look at the impact of creativity, social context and self-efficacy on entrepreneurial intentions. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24(1), 214–233. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-07-2016-0205>
- Cavendish, W., dan Connor, D. (2018). Toward Authentic IEPs and Transition Plans: Student, Parent , and Teacher Perspectives. *Learning Disability Quarterly*, 41(1), 32–43. <https://doi.org/10.1177/0731948716684680>
- Chen, C. C., Greene, P. G., dan Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? *Journal of Business Venturing*, 13(4), 295–316. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(97\)00029-3](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(97)00029-3)
- Connor, D. J., dan Cavendish, W. (2018). Sharing Power With Parents: Improving Educational Decision Making for Students With Learning Disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 41(2), 79–84. <https://doi.org/10.1177/0731948717698828>
- Cook, S. C., dan Rao, K. (2018). Systematically Applying UDL to Effective Practices for Students With Learning Disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 41(3), 179–191. <https://doi.org/10.1177/0731948717749936>
- Cunningham, C., Cunningham, S. A., Halim, N., dan Kathryn, M. (2018). Public Investments in Education and Children ’ s Academic Achievements Public Investments in Education and Children ’ s Academic Achievements. *The Journal of Development Studies*, 00(00). <https://doi.org/10.1080/00220388.2018.1516869>

- Daley, S. G., dan Rappolt-schlichtmann, G. (2018). Stigma Consciousness Among Adolescents With Learning Disabilities : Considering Individual Experiences of Being Stereotyped. *Learning and Instruction*, 41(4), 200–2012. <https://doi.org/10.1177/0731948718785565>
- Direktorat PLB, (2007). Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif, Ramah terhadap Pembelajaran, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Dubini, P. (1988). THE INFLUENCE OF MOTIVATIONS AND START-UPS : SOME HINTS FOR PUBLIC POLICIES. *Journal of Business Venturing*, 4, 11–26.
- Galvão, A., Marques, C. S., dan Marques, C. P. (2018). Antecedents of entrepreneurial intentions among students in vocational training programmes. *Education + Training*. <https://doi.org/10.1108/ET-03-2017-0034>
- Gartland, D., dan Strosnider, R. (2018). Learning Disabilities : Implications for Policy Regarding Research and Practice : A Report by the National Joint Committee on Learning Disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 41(4), 195–199. <https://doi.org/10.1177/0731948718789994>
- Haley, K., Allsopp, D., dan Hoppey, D. (2018). When a Parent of a Student With a Learning Disability Is Also an Educator in the Same School District : A Heuristic Case Study. *Learning Disability Quarterly*, 41(1), 19–31. <https://doi.org/10.1177/0731948717690114>

- Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium. *Communication Monographs*, 76(4), 408–420. <https://doi.org/10.1080/03637750903310360>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis. A Regression-based Approach*. New York: The Guilford Press.
- Hartaji, D. A. (2012). *Motivasi Berprestasi Pada Mahasiswa Yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orang Tua*. Skripsi strata satu; Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
- Istiqomah, Husnul. (2020) urvei Tentang Penerapan Mata Kuliah Pendidikan Inklusi Pada Semua Program Studi di FKIP Universitas Lambung Mangkurat. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)* <https://journal31.unesa.ac.id/index.php/ji/article/view/10912>
- Jeynes, W. H. (2007). The relation between parental involvement and urban secondary school student academic achievement a meta-analysis. *Urban Education*, 42(1), 82–110.
- Kautonen, T., Van Gelderen, M., dan Fink, M. (2015). Robustness of the theory of planned behavior in predicting entrepreneurial intentions and actions. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 39(3), 655–674. <https://doi.org/10.1111/etap.12056>
- Kickul, J., Gundry, L. K., Barbosa, S. D., dan Whitcanack, L. (2009). Intuition Versus Analysis? Testing Differential Models of Cognitive Style on Entrepreneurial Self Efficacy and the New Venture Creation Process. *Entrepreneurship*

Theory and Practice, 33(212), 439–453.
https://doi.org/10.1111/j.1540_6520.2009.00298.x

Kristjánsson, K. (2012). Positive Psychology and Positive Education: Old Wine in New Bottles. *Positive Psychology and Positive Education: Old Wine in New Bottles. Educational Psychologist*, 47(2), 86–105.
<https://doi.org/10.1080/00461520.2011.610678>

Kusnia, N. (2019). Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan pendidikan Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1).
<https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p25-30>

Levi, U., Einav, M., Ziv, O., Raskind, I., dan Margalit, M. (2013). Academic expectations and actual achievements : the roles of hope and effort. *European Journal of Psychology Education*.
<https://doi.org/10.1007/s10212-013-0203-4>

Lu, Y., Chen, H., Hong, Z., Yore, L. D., Chen, H., Hong, Z., dan Yore, L. D. (2016). Students ' awareness of science teachers ' leadership , attitudes toward science , and positive thinking. *International Journal of Science Education*, 0(0), 1–23.
<https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1230792>

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., dan Norman, S. M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with. *Personnel Psychology*, 60, 541–572.

Luthans, F., Luthans, K. W., dan Luthans, B. C. (2004). social capital Positive psychological capital: Beyond human and

- social capital. *Business Horizons*, 47(1), 45–50.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2003.11.007>
- Maki, K. E., Burns, M. K., dan Sullivan, A. L. (2018). School Psychologists ' Confidence in Learning Disability Identification Decisions. *Learning Disability Quarterly*.
<https://doi.org/10.1177/0731948718769251>
- Michael, D. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. *Jurnal HAM*, 11(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217>
- Miles, Susie and Nidhi Singal. (2010). *The Education For All And Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction Or Opportunity*. *International Journal of Inclusive Education*
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603110802265125>
- Nolzen, N. (2018). The concept of psychological capital: a comprehensive review. *Management Review Quarterly*.
<https://doi.org/10.1007/s11301-018-0138-6>
- Nur'aeni, 2016. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Purwokerto:UM Purwokerto Press.
- O'Brien, M., dan Blue, L. (2017). Towards a positive pedagogy: designing pedagogical practices that facilitate positivity within the classroom. *Educational Action Research*, 0792(June), 1–20.
<https://doi.org/10.1080/09650792.2017.1339620>
- Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi*

- Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Kementerian Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Prasetyo, E. (2018). *Ciptakan positive learning dalam pembelajaran*: Faizin, M.K (Ed). Mencipta pendidikan. pp. 65-71. Gresik: Cermedia Publising
- Preacher, K. J., dan Hayes, A. . (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879–891. <https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879>
- Ro'fah, Andayani, Muhrisun. (2010). *Membangun Kampus Inklusif, Best Practices Pengorganisasian Unit Layanan Difabel*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD), UIN Sunan Kalijaga.
- Saadati, B. A., dan Sadli, M. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusi Berbasis Pengembangan Diri Di Sekolah Alam Jogja Green School. *El Midad*, 11(2). <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1898>
- Sarwono, S.W. 1978. *Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis dalam Gerakan Protes Mahasiswa*. Bulan Bintang. Jakarta.

- Smith, M. K. (2009). Teori Pembelajaran dan Pengajaran Dilengkapi Dengan Manajemen Ingatan Emosional dan Cara Cepat Memperbaiki Daya Ingat. Jogjakarta: Mirza Media Pustaka.
- Scanlon, D., Saenz, L., dan Kelly, M. P. (2018). The Effectiveness of Alternative IEP Dispute Resolution Practices. *Learning Disability Quarterly*, 41(2), 68–78. <https://doi.org/10.1177/0731948717698827>
- Seligman, M. E. P., dan Csikszentruihalyi, M. (2000). Positive psychology: an introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14.
- Seligman, M. E. P., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., dan Linkins, M. (2009). Positive education : positive psychology and classroom interventions. *Oxford Review of Education*, 35(3), 293–311. <https://doi.org/10.1080/03054980902934563>
- Shankland, R., dan Rosset, E. (2016). Review of brief school-based positive psychological interventions : a taster for teachers and educators. *Education Psychology Review*. <https://doi.org/10.1007/s10648-016-9357-3>
- Shoshani, A., dan Slone, M. (2017). Positive education for young children : effects of a positive psychology intervention for preschool children on subjective well being and learning behaviors. *Frontiers in Psychology*, 8(1866), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01866>
- Solesvik, M. z. (2013). Entrepreneurial motivations and intentions: Investigating the role of education major. *Education + Training*, 55(3), 253–271. <https://doi.org/10.1108/00400911311309314>

- Siswoyo, D. (2007). Ilmu pendidikan. Yogyakarta: UNY Pers
- Suparno, S., Praptiningrum, N., dan Purwandari, E. (2019). Dampak implementasi pendidikan inklusi terhadap aspek akademik siswa lamban belajar (slow learner). *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 11(1). <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v11i1.23795>
- Takeda, T., dan Lamichhane, K. (2018). Determinants of schooling and academic achievements : Comparison between children with and without disabilities in India. *International Journal of Educational Development*, 61, 184–195. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.01.003>
- Thompson, J., 2010. *Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Indonesia: Penerbit Erlangga.
- Tietz, M. A., dan Parker, S. C. (2012). How Do Intrapreneurs and Entrepreneurs Differ in Their Motivation To Start a New Venture? *Frontiers of Entrepreneurship Research*, 32(4), 146. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=94339985&site=eds-live>
- Zee, M., dan Koomen, H. M. Y. (2016). Teacher Self-Efficacy and Its Effects on Classroom Processes , Student Academic Adjustment , and Teacher Well-Being : A Synthesis of 40 Years of. *Review of Educational Research*, 20(10), 1–35. <https://doi.org/10.3102/0034654315626801>



TENTANG PENULIS



HARWANTI NOVIANDARI, dilahirkan pada tanggal 05 November 1983, Banyuwangi, Jawa Timur, putri dari pasangan bapak Suharno dan Ibu Sri Purwaningsih, anak pertama dari dua bersaudara. Ibu dari dua putra Fahad Indra Tanaya (13tahun) dan Fariq Aditya Permana (6tahun). Pendidikan formal diselesaikan di SD Negeri Kebalenan Banyuwangi (1995), SMP Negeri 2 Banyuwangi (1998), SMA Katolik Hikmah Mandala Banyuwangi (2001), Diploma 1 Program Studi Informatika Terapan Universitas Airlangga (2002), S1 Program Studi Psikologi Universitas PGRI Banyuwangi (2006), S2 Program Magister Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2014).

Sejak tahun 2015 menjadi tenaga pengajar di Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi, mengampu mata kuliah

Psikologi Pendidikan, Assesment Psikologi Teknik Non Tes, Assesment Psikologi Teknik Non Tes, Konseling Multi Budaya, Konseling Kognitif, Praktikum Konseling Kognitif, Bimbingan dan Konseling di Pendidikan Non Formal. Pengalaman Penelitian, tahun 2018 mendapat hibah penelitian dosen pemula dari Kemenristekdikti, dengan judul “Peran Keluarga, Sekolah dan Pemerintah Dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Banyuwangi”, tahun 2019 mendapat hibah penelitian dosen pemula dari Kemenristekdikti, dengan judul “Identifikasi Dini Guna Mengoptimalkan Kemampuan Bahasa Pada Anak Tuna Rungu Usia Pra Sekolah Di Kecamatan Banyuwangi”, Penelitian Kelembagaan dari Kemdikbud tahun 2020 dengan Judul “Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pengembangan Kurikulum dan Kerjasama”, dan pada tahun 2021 Penelitian Kelembagaan hibah Kemdikbud tentang “inovasi Pembelajaran Perguruan tinggi dengan tema Pendidikan Khusus.

Aktif melakukan pengabdian masyarakat, sejak tahun 2016 sebagai narasumber dengan tema Bahaya Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Remaja Di Kordsa Dinas Pengairan Genteng Banyuwangi tahun 2019 KKN PPM yang di biyai oleh Ristetek dikti dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Dalam Peningkatan Ekonomi Melalui Pelatihan Membuat dan Kerajinan Anyaman Bambu.



FITRIATUL MASRUROH, dilahirkan pada tanggal 06 maret 1995 di sebuah desa kecil kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. anak pertama dari dua bersaudara. Perempuan yang selalu merayakan kebahagiaan dengan cara yang sederhana, suka melakukan *self healing* dengan menulis, *hunting* di alam terbuka atau berkunjung kesitus peninggalan bersejarah.

Ranu Dyah F.M nama anonime yang sering ia pakai dalam tulisan Quotes.

Fitri merupakan alumni S1 universitas Darul Ulum jombang fakultas Psikologi. Meskipun pada awal kuliah mendapatkan pertentangan dari sang aba, namun karena mampu membuktikan, akhirnya ia mendapat dukungan kuat dari keluarga untuk melanjutkan ke jenjang magister profesi Psikologi di Universitas 17 agustus Surabaya (UNTAG).

Saat ini Fitri aktif sebagai konsultan dilayanan Lembaga Psikologi EKSHAFIT, berprofesi dosen di suatu lembaga Pendidikan Di Kab. Banyuwangi, serta aktif menjadi judges untuk Cooperative Positive Learning, dan juga volunteer Pusat Studi Gender dan Anak, fitri juga aktif menulis di beberpa media.